

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Kedua, Cetakan Kedelapan, 2014.
- Bambang Sutiyo dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, Amzah, Jakarta, 2012.
- Djoko Prakoso, *Upaya Hukum Yang Diatur di dalam KUHAP*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, Cetakan Pertama, 1987.
- Duwi Handoko, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia*, Hawa dan Ahwa, Pekanbaru, 2017.
- Eva Achjani Zulfa dkk, *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, PT Al Maarif, Yogyakarta, 1994.
- Jan Samuel Maringka, *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Lasdin Wlas, *Cakrawala Advokat Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1989.
- Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Maya Shafira dkk, *Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Media, Lampung, 2022.
- Mia Banulita, *Asas Penuntutan Tunggal*, Guepedia, Bogor, 2023.
- Muhammad Junaidi, *Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan*, Suluh Media, Yogyakarta, 2018.
- Oly Viana Agustine, *Sistem Peradilan Pidana: Suatu Pembaharuan*, Rajawali Pers, Depok, 2019.
- Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian: Profesionalisme dan Reformasi POLRI*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007.
- Ramelan, *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2006.

- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Jakarta, 1996.
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011.
- Sadjijono, *Hukum Kepolisian: Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2006.
- Sentot Imam Wahjono, *Perilaku Organisasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Siska Lis Sulistiani, *Peradilan Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021.
- Suharto Rm, *Penuntutan dan Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Setara Pers, Malang, 2014.
- Tolib Effendi, *Praktik Peradilan Pidana: Kemahiran Beracara Pidana Pada Pengadilan Tingkat Pertama*, Setara Press, Malang, 2016.
- Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Berbagai Negara*, Media Presindo, Yogyakarta, 2013.
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Yudi Kristiana, *Menuju Kejaksanaan Progresif: Studi Tentang Penyelidikan, Penyidikan, Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*, Masyarakat Transparansi Indonesia, Jakarta, 2010.

B. Jurnal

- Adam Ilyas, Independensi Penuntut Umum dalam Kebijakan Rencana Tuntutan Berjenjang untuk Menentukan Tuntutan Pidana, *Pandecta Research Law Journal* 16 (1), Juni, 2021.

Ahmad Habib Maftukhan, “Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Batal Demi Hukum Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Jurnal Verstek*, Vol 2, No 2, 2014.

Appludnopsanji dan Pujiyono, Restrukturisasi Budaya Hukum Kejaksaan Dalam Penuntutan Sebagai Independensi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Sasi*, Volume 26 Nomor 4.

Ario Feby Fredika dkk, “Kedudukan Kejaksaan di Indonesia: Perspektif Fiqih Siyasah”, *As-Siyasi*, Volume 2, No 1, 2022.

Gita Santika, “Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan”, *Progresif: Jurnal Hukum*, Volume 15, Nomor 1, Juni 2021.

Johari, “Kebenaran Materiil dalam Kajian Hukum Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, Vol VIII Nomor 2, November 2020.

Muh Ibnu Fajar Rahim, “Asas-Asas Hukum Penuntutan: The Legal Principles Of Prosecution”, *The Prosecutor Law Review*, Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum Kejaksaan Agung, Vol 1, No 01, April 2023.

Ook Mufrohim, Ratna Herawati, ”Independensi Lembaga Kejaksaan sebagai Legal Structure didalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) di Indonesia”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 3, 2020.

Sufriadi, “Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia”, *Jurnal Yuridis*, Volume 1, Nomor 1, Juni 2014.

Tiar Adi Riyanto, “Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia”, *Lex Renaissance*, Vol 6, No 3, 2021.

C. Tesis

Anton Sutrisno, “Kemandirian Jaksa Sebagai Penuntut Umum (Analisis Terhadap Kebijakan Rencana Tuntutan)”, *Tesis*, 2011, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

D. Dokumen Lain

Data Perkara Tindak Pidana Umum Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

Laporan hasil kerja Tim Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas dalam Hukum Acara Pidana Tahun Anggaran 2006.

Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa, Modul Penuntutan, Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I. , Jakarta, 2019.

E. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-39/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus.

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-017/A/JA/07/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-39/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus.

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-013/A/JA/11/2017 tentang Strategi Kepemimpinan.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-24/E/Ejp/12/2019 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 227 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana Umum.

Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 21 Tahun 1983 tentang Batas Waktu Pengiriman Salinan Putusan pada Jaksa.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tertanggal 4 Februari 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP.

F. Data Elektronik

CR, Hukum Online, *JPU Kasus Hariono Diusulkan untuk Dipecat*, diakses di <https://www.hukumonline.com/berita/a/jpu-kasus-hariono-diusulkan-untuk-dipecat-ho14520>.

Team Asana, “Pendekatan Top-Down vs Bottom-Up: Apa Bedanya?”, diakses di <https://asana.com/id/resources/top-down-approach>.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Pelaksanaan Asas Oportunitas dalam Hukum Acara Pidana*, diakses di <https://bphn.go.id/data/documents/pelaksanaan-asas-oportunitas-dalam-hukum-acara-pidana.pdf>.

Case Management System (CMS) – Publik, Kejaksaan Republik Indonesia, diakses di <https://cms-publik.kejaksaan.go.id/>.

Kejaksaan Agung, *Tugas dan Wewenang*, diakses di <https://www.kejaksaan.go.id/pages/tugas-dan-wewenang>.

Persatuan Jaksa Indonesia, *Satu Komando Penuntutan Untuk Sipil dan Militer*, diakses di <https://www.kejaksaan.go.id/berita/s/satu-komando-penuntutan-sipil-dan-militer-b7d8e>.

Rizky Malianto Ramadani, *Tinjauan Analisis Kejaksaan Republik Indonesia, Perspektif Budaya Organisasi*, diakses di

<https://media.neliti.com/media/publications/548642-tinjauan-analisis-kejaksaan-republik-ind-bcdfb613.pdf>.

G. Sumber Lain

Wawancara dengan Nur Maya, S.H., M.H., Jaksa Fungsional Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Yogyakarta, di Kantor Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Jumat 8 November 2024.

Wawancara dengan Nur Maya, S.H., M.H., Jaksa Fungsional Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Yogyakarta di Kantor Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Jumat 20 Desember 2024.

Wawancara dengan Pramono Mulyo, S.H., M.Hum., Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta di Kantor Kejaksaan Tinggi DI Yogyakarta, Selasa, 3 Desember 2024.